

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi secara geografis terletak pada 103° 23- 104° 21 Bujur Timur dan 0° 53-01° 41 Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 5.009,82 km² dengan luas perairan/lautan sebesar 141,75 km². (BPS Provinsi Jambi, 2015). Pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Kuala Tungkal, yang memiliki 3 (Kecamatan) wilayah pesisir, yaitu kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Seberang Kota. Wilayah Kuala Tungkal berada di posisi yang berhadapan langsung dengan kawasan laut Cina Selatan, kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi sumberdaya perikanan tangkap yang sangat besar. Terutama potensi sumber daya ikan. Potensi ini belum tergali dan diharapkan pada masa yang akan datang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi bagi pengembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelabuhan Perikanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan infrastruktur perikanan serta merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap. Pelabuhan perikanan bertujuan memberikan pelayanan terbaik dalam pemenuhan kepentingan masyarakat perikanan, terutama nelayan sebagai salah satu elemen yang memiliki peran dominan dalam menggerakkan kegiatan perikanan. Adanya pelabuhan perikanan, aktifitas perikanan tangkap akan lebih terarah dan teratur. Sebuah pelabuhan perikanan bukan hanya menyediakan fasilitas untuk aktivitas pendaratan, maupun pengolahan perindustrian hasil tangkapan tetapi juga memberikan pelayanan yang optimal terhadap pengguna pelabuhan perikanan khususnya nelayan sebagai pengguna fasilitas yang tersedia sesuai dengan fungsinya (Nurhayatin et al, 2016).

Pengoperasian pelabuhan dapat menghasilkan pendapatan yang besar apabila dikelola secara profesional, baik itu pelabuhan niaga, pelabuhan perikanan, maupun jenis pelabuhan lainnya karena pelabuhan mempunyai fungsi komersial. Pendapatan pelabuhan dapat berupa hasil penjualan jasa-jasa maupun pajak atau retribusi yang

dikenakan pada aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya aktivitas pelelangan ikan di pelabuhan perikanan.

Peningkatan jumlah unit penangkapan di suatu pelabuhan harus disertai dengan berkembangnya fasilitas-fasilitas pelabuhan dan peningkatan terhadap pelayanan kebutuhan melaut. Pelayanan yang diberikan oleh pihak pelabuhan pada umumnya adalah pelayanan terkait dengan operasional fasilitas, sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna pelabuhan. Aktivitas pelayanan kebutuhan operasional penangkapan ikan menyediakan kebutuhan pada waktu penangkapan ikan. Pelayanan yang dibutuhkan meliputi berbagai kegiatan pada saat keberangkatan menuju *fishing ground* atau daerah penangkapan ikan, seperti ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), air bersih dan es, serta kegiatan pada saat kembali ke *fishing base* atau pelabuhan, kondisi dermaga, kondisi tempat pelelangan ikan (TPI) dan ketersediaan basket (Diniah et al, 2012).

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal terletak di Kecamatan Tungkal Ilir Desa Tungkal 1. Dengan luas area daratan sekitar 3,9 hektar (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi, 2019). Fasilitas PPP Tungkal terdiri dari fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. Fasilitas pokok (PPP)Kuala Tungkal yang ada yaitu dermaga, kolam pelabuhan dan jalan kompleks sedangkan fasilitas fungsional yaitu terdiri dari fasilitas tempat pelelangan ikan, ruang gengset, pabrik es, mesin penghancur es, SPBN(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) dan sumur bor dan fasilitaspenunjang terdiri dari kantor administrasi, rumah karyawan, pos jaga dan ruang pertemuan nelayan.

Kondisi ekologi di PPP Kuala Tungkal belum terjaga dengan baik dikarenakan Sebagian nelayan di PPP Kuala Tungkal masih menggunakan alat tangkap kurang ramah lingkungan yaitu alat tangkap trawl. Dalam dimensi ekonomi hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPP Kuala Tungkal langsung dijual kepada pembeli di dermaga dan tengkulak. Adanya keterikatan kerjasama dengan tengkulak yang telah terlebih dahulu membantu biaya operasional melaut bagi nelayan. kondisi sosial kesejahteraan nelayandi PPP Kuala Tungkal belum terpenuhi dikarenakan masih terjadinya konflik.

Berdasarkan fenomena yang ada maka perlu dilakukan penelitian terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap untuk menghindari penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang akan mengakibatkan (*over exploited*) penangkapan yang telah melewati batas keberlanjutan atau melampaui *Maximum Sustainable Yield* (MSY) di Perairan Kuala Tungkal. Sehingga kedepannya diperlukan berbagai stimulan yang dapat memacu perkembangan usaha perikanan tangkap agar tetap prospektif dengan tetap mempertimbangkan azas keberlanjutan.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status keberlanjutan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial secara multidimensional.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun tambahan pengetahuan antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan pihak lain, dalam upaya mencari status keberlanjutan perikanan tangkap yang tepat pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal.